



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYEDIAAN FASILITAS TERHADAP
PENUMPANG PADA TERMINAL BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR: PM 40 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG
ANGKUTAN JALAN**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

MASSIDIK SIREGAR

NIM: 11527104063

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**



PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Fasilitas Terhadap Penumpang Pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angutan Jalan"*

Nama : MASSIDIK SIREGAR
NIM : 11527104063
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat di terima dan di setuju untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Februari 2020

Pembimbing Skripsi

NUR HIDAYAT, SH.,MH

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Fasilitas Terhadap Penumpang Pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan” yang ditulis oleh:

Nama : Massidik Siregar
 NIM : 11527104063
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqashkan pada:
 Hari / Tanggal : Selasa, 07 April 2020
 Waktu : 08,00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Mei 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Musrifah., SH, MH

Penguji I
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji II
Firdaus, SH., MH

UIN SUSKA RIAU



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Massidik Siregar (2020): Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Fasilitas Terhadap Penumpang Pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Penyediaan fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan adalah tolak ukur ataupun standar penyelenggara dalam menyediakan fasilitas dan pelayanan. Kurangnya fasilitas pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki akan berdampak terhadap ketidakpuasan penumpang terhadap fasilitas dan pelayanan serta penumpang tidak mendapatkan hak penggunaan fasilitas sesuai dengan peraturan yang telah diamanatkan, dan yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana kebijakan penyelenggara dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki dan faktor penghambat dalam penyediaan fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan beserta dampak yang dilaksanakan penyelenggara Terminal Bandar Raya Payung Sekaki terhadap penyediaan fasilitas pada Terminal terhadap penumpang.

Metode penelitian ini ialah hukum empiris, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif. Dengan lokasi penelitian di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki kota Pekanbaru. Subjek dalam penelitian ini adalah BPTD wilayah iv Provinsi Riau-Kepri dan Satuan Pelayanan Terminal Bandar Payung Sekaki. Objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan penyediaan fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan studi pustaka. Dalam penarikan sampel menggunakan random sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan belum optimal dan belum terlaksanakan secara keseluruhan, masih banyak fasilitas-fasilitas yang belum tersedia terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki. Adapun faktor penghambat dalam Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Terhadap Penumpang Pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki antara lain yaitu masih minimnya anggaran dan kurangnya partisipasi masyarakat khususnya penumpang pada Terminal.

1. Diararar mengutip abagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararar mengumumkan dan memperbanyak abagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Fasilitas Terhadap Penumpang Pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan”**, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Seterusnya shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, pelopor dan penuntun dasar-dasar berdirinya suatu pemerintah islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan politik.

Sebagai makhluk sosial, penulis tentu tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak baik langsung, maupun tidak langsung. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih terutama untuk

1. Ayahanda tercinta Zulakhir Siregar dan Ibunda tercinta Asnaria Simatupang, terimakasih yang tak terhingga karena tak henti-hentinya memberikan doa, nasehat, serta dukungan moril dan materil kepada penulis, serta saudara saya Anwar siregar, Agus Siregar, Santo Siregar, Usman Siregar selaku abang kandung dari penulis. Serta adik-adik penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saut Siregar dan Annisa Siregar yang juga telah memberikan semangat serta doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Rektor UIN SUSKA Riau Prof. Dr. H. Akhmad mujahidin, S. Ag., M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan pengetahuan di Universitas Islam Negeti Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Firdaus, SH., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Ilham Akbar, S.H.I., SH., MH, selaku penasehat akademik yang selalu memberikan pengarahan penulis agar melalui proses perkuliahan dengan baik dan agar segera menyelesaikan skripsi secepatnya.

6. Bapak Nurhidayat SH., MH selaku Pembimbing untuk Penulisan Skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.

7. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

8. Seluruh karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau, Fakultas Syariah dan Hukum dan Pustaka Wilayah serta Perpustakaan lainnya yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.

9. Seluruh teman-teman penulis Reza Faisal, Sholahudin Batubara, Fajar, Habibi, Bambang Sarumpaet, Parlindungan Siregar, Ali Muda Ritonga,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karani Iwan, Syarah Handayani, Riska Kholilah lubis. Serta teman-teman jurusan Ilmu Hukum D angkatan 2015, Bowo Wiguna, Zulfan Arif, Muhammad Adnan, Maharaden Khusuma, Ramlan Pulungan, Jumfitriadi, Nurhasanah, Jihan Fauziah, Nurul Fauzah, Rila dan lain sebagainya

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun tehnik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca, amin.

Pekanbaru, Februari 2020

Penulis,

MASSIDIK SIREGAR
NIM. 11527104063

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan sifat Peneletian	10
2. Lokasi Penelitian.....	11
3. Subjek Dan Objek Penelitian	11
4. Populasi Dan Sampel	11
5. Jenis Dan Sumber Data	13
6. Metode Pengumpulan Data.....	13
7. Analisa Data	14
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	17
A. Letak Geografis Kecamatan Payung sekaki.....	17
B. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki	18
C. Visi dan misi	18
D. Struktur organisasi terminal bandar raya payung sekaki	20
1. Tugas dan fungsi KORSAPEL Terminal Bandar Raya Payung Sekaki	21
2. Tugas dan fungsi pengatur lalu lintas.....	21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS.....	22
A. Kebijakan (<i>Freies Ermessen</i>).....	22
B. Perhubungan.....	34
C. Pelayanan Prima.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Fasilitas Terhadap Penumpang Pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki.....	47
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Fasilitas Terhadap Penumpang Pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki.....	56
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	x



DAFTAR TABEL

Populasi dan Sampel	12
---------------------------	----



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR SINGKATAN

1. AKAP	: Antar Kota Antar Provinsi
2. AKDP	: Antar Kota Dalam Provinsi
3. APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. BPTD	: Balai Pengelolah Transportasi Darat
5. HA	: Hektar
6. JUKNIS	: Petunjuk Teknis
7. KORSATPEL	: Kordinator Satuan Pelayanan
8. LALIN	: Lalu Lintas
9. LLAJ	: Lalu Lintas Angkutan Jalan
10. PM	: Peraturan Menteri
11. SOP	: Standar Operasional Prosedur
12. UPPKB	: Unit Pelaksanaan penimbangan Kendaraan Bermotor
13. UUD	: Undang-Undang Dasar
14. UU	: Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki	20
--	----





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan menyebabkan kebutuhan transportasi yang semakin meningkat sehingga masyarakat menuntut fasilitas pelayanan umum yang memadai di bidang transportasi, pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak¹ artinya, pemerintah sudah seharusnya memenuhi fasilitas yang memadai dan layak di bidang transportasi khususnya pada terminal sehingga penumpang merasa nyaman, aman, dan merasa puas terhadap fasilitas yang disediakan penyelenggara khususnya pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki. Dalam lalu lintas dan angkutan jalan harus diselenggarakan dengan memperhatikan asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efesian, efektif, asas seimbang, asas terpadu dan asas mandiri,² sehingga angkutan jalan khususnya pada terminal dapat bermanfaat dengan sebaik mungkin baik bagi pemerintah maupun penumpang pada terminal.

Dalam pencapaian pembangunan nasional peranan transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu, untuk

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (3)

² Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlaksananya keterpaduan maka di tempat-tempat tertentu perlu di bangun dan diselenggarakan terminal.³

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki adalah sebuah terminal besar yang terletak di Pekanbaru Riau yang luas kawasannya 27 hektare (HA) dan luas bangunan pendukung 7 HA.. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki ini dibangun untuk menggantikan Terminal Mayang Terurai yang terletak di jalan Nangka (Tanjung Tambusai). Terminal Bandar Raya Payung Sekaki melayani trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki dikelola langsung dibawah Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, yang mana BPTD bertanggung jawab terhadap Direktur Jendral Perhubungan Darat. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat pasal 4, adapun tugas beserta fungsi BPTD yaitu (a)Penyusunan rencana, program dan anggaran, (b)Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan Terminal Pemandang Tipe A.⁴ BPTD adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Darat.

Setiap hari menjelang libur Idul Fitri, menjelang libur natal, dan libur panjang lainnya penumpang angkutan jalan pada Terminal Terminal Bandar Raya

³ Siska V Pandey, *Pentingnya Master Plan Dalam Proses Pembangunan Terminal Angkutan Jalan*, (Manado, Vol 4 No 6, Juni 2016), h.392

⁴ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Pasal 4 Huruf (B)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Payung Sekaki bertambah signifikan sehingga menuntut pengelola terminal menyediakan fasilitas dan pelayanan dengan semaksimal mungkin, sehingga harapan masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan sesuai yang diinginkan. Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat, kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti :

- a. Kinerja (*performance*)
- b. Keandalan (*reliability*)
- c. Mudah dalam penggunaan (*easy of use*)
- d. Estetika (*esthetics*)⁵

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, tidak dapat untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.⁶

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang

⁵ Sinambela Dkk, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.34.

⁶ Robi Cahyadi Kurniawan, *Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah*, (Lampung: Fiat Justisia Journal Of Law, Volume 10 Issue 3, July-September 2016), h. 571

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angkutan Jalan, wajib disediakan dan dilaksanakan pelayanan ataupun fasilitas yang mencakup:

1. Pelayanan keselamatan: pelayanan keselamatan bagi penumpang antara lain: lajur pejalan kaki (lajur pejalan kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor), fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, penerang jalan, pagar), jalur evakuasi, pos, fasilitas dan petugas kesehatan, informasi fasilitas kesehatan (tersedia informasi fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dengan jelas).
2. Pelayanan keamanan: fasilitas keamanan (tersedia pos keamanan, kamera pengawas, dan titik pengamanan tertentu, media pengaduan gangguan keamanan (tersedia stiker pada tempat yang strategis dan mudah terlihat dan dibaca berupa stiker berisi nomor telepon atau sms), petugas keamanan (minimal 2 petugas berseragam dan mudah terlihat).
3. Pelayanan kehandalan/keteraturan: jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum secara umum secara tertulis beserta realisasi jadwal secara tertulis, jadwal kendaraan umum dalam dan luar dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis, loket penjualan tiket.
4. Pelayanan kenyamanan: ruang tunggu, (ruangan/tempat yang disediakan untuk penumpang sebelum naik bus seperti tersedianya tempat duduk dan), toilet (toilet untuk umum maupun penyandang disabilitas, fasilitas peribadatan/musollah, ruang terbuka hijau, rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makan (rumah makan sesuai kebutuhan), fasilitas dan petugas kebersihan, area merokok, drainase, area jaringan internet, ruang baca, lampu penerang ruangan.

5. Pelayanan kemudahan/keterjangkauan: letak jalur kedatangan, letak jalur keberangkatan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan (informasi yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang kurangnya memuat jenis angkutan, lokasi angkutan, jam pelayanan angkutan lanjutan, jurusan/rute, tarif), informasi gangguan perjalanan mobil bus (fasilitas dalam terminal yang memberikan informasi penyebab keterlambatan jadwal perjalanan mobil bus informasi diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar), tempat penitipan barang, fasilitas pengisian baterai, tempat naik/turun penumpang, tempat parkir (disesuaikan dengan lahan yang tersedia).
6. Pelayanan kesetaraan: fasilitas penyandang cacat (toilet pengguna difabel dan kursi roda) dan ruang ibu menyusui (tersedia ruang tertutup khusus beserta fasilitas lengkap untuk ibu menyusui).⁷

Standar pelayanan terminal merupakan pedoman bagi penyelenggara

Terminal angkutan jalan dalam memberikan pelayanan jasa kepada seluruh pengguna Terminal khususnya terhadap penumpang.

Berdasarkan observasi dilapangan, terlihat dalam kasat mata bahwasannya fasilitas-fasilitas pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki belum terpenuhi

⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

secara keseluruhan, salah satu contohnya ialah tidak tersedianya ruang ibu menyusui, ruang baca (*reading corner*), tempat khusus merokok (*smoking area*), toilet khusus difabel, kamera atau cctv, media pengaduan gangguan dan lain sebagainya, sehingga masyarakat khususnya penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki belum dapat menggunakan fasilitas ataupun pelayanan seperti yang diharapkan, dan sudah seharusnya pemerintah ataupun pihak penyelenggara membuat kebijakan-kebijakan agar secepatnya terbangun fasilitas-fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki.

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat, dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.⁸ Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil tertentu yang di harapkan publik sebagai konstituen pemerintah.⁹

Penyelenggara Terminal khususnya pemerintah sudah seharusnya menyediakan fasilitas dan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat, khususnya fasilitas pada penumpang di terminal, karena masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat.¹⁰ Bapak Marjohan selaku salah satu petugas pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki mengatakan “fasilitas-fasilitas pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki masih belum tersedia secara keseluruhan dan juga masih banyak fasilitas-fasilitas yang

⁸ Uddin B Sore Dkk, *Kebijakan Publik*, (Makasar: CV Sah Media, 2017), h. 24.

⁹ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), h. 5

¹⁰ Robi Cahyadi Kurniawan, *Op. Cit.*, h.157.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus disediakan pada penyelenggara khususnya terhadap penumpang pada Terminal.¹¹

Jika pelayanan ataupun fasilitas yang telah diuraikan sebelumnya masih banyak yang belum tersedia. maka dari itu, penyelenggara dalam menjalankan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dalam memberikan pelayanan ataupun fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung sekaki masih belum maksimal dan masih belum berjalan dengan baik, oleh sebab itu penyelenggara sudah seharusnya lebih memperhatikan lagi apa saja fasilitas-fasilitas yang belum tersedia pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki.

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain agar mengetahui pelaksanaan kebijakan penyediaan fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Berkaian dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Fasilitas Terhadap Penumpang Pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.**

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Marjohan, Mei 2019 Di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Berhubungan dengan latar belakang di atas agar pembahasan ini lebih terarah dan menghindari agar tidak menyimpang dari topik yang di persoalkan, maka hal-hal yang mengenai permasalahan penelitian yaitu Kebijakan penyediaan fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan penyediaan fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan?
2. Apa faktor penghambat terhadap penyediaan fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan mamfaat yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk menyelesaikan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data yang akurat dan dapat memberikan mamfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mempunyai tujuan dan mamfaat sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui penyebab tidak tersedianya fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap penyebab tidak tersedianya fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi mamfaat dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang hukum dan mendapatkan pengetahuan tentang apa penyebab tidak tersedianya fasilitas pada termina bandar raya payung sekaki
- b. Diharapkan dapat menambah bahan refrensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi peneliti selanjutnya
- c. Untuk memperoleh gelar sarjana.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹² dan metode penelitian juga merupakan suatu sasaran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Kualitatif R&D*, (Afabeta, Bandung, 2014), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹³ Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian agar terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.¹⁴ Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, dimana penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi untuk mencari data lapangan.¹⁵ Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan membandingkan antara aspek hukum yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku di lapangan, dan penulis menulis Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Fasilitas terhadap penumpang Pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dimaksud untuk menjelaskan bagaimana kebijakan penyelenggara dalam menyediakan fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafari, 2015), h.17.

¹⁴ Suratman Dan H Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Alfabeta 2015), h. 106.

¹⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, selain itu penulis menemukan kesenjangan antara peraturan dan penerapannya di lapangan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah kepala seksi sarana dan prasarana BPTD wilayah iv Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, korsapel Terminal Bandar Raya Payung Sekaki dan pegawai Terminal Bandar Raya Payung Sekaki. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan penyediaan fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi bisa berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama, Sampel adalah himpunan dari populasi.¹⁶ Metode pengambilan sampel pada penelitian ini *random sampling* yaitu cara pengambilan

¹⁶Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.119.



sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk di ambil kepada setiap elemen populasi.¹⁷

**TABEL I.1
POPULASI DAN SAMPEL**

	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	1 orang	1 orang	100%
2	Kasubag BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	1 orang	1 orang	100%
3	Pegawai Administrasi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki	2 orang	2 orang	100%
4	Korsapel Terminal Bandar Raya Payung Sekaki	1 orang	1 orang	100%

¹⁷Didin Fathiudin, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi, Manajemen Dan Akutansi*, (Soloarjo: Zitama Publisher, 2015), h.72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala seksi sarana dan prasarana BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Kasubag BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Pegawai Administrasi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki, Karsapel Terminal Terminal Bandar Raya Payung Sekaki menggunakan tehnik pengumpulan data berbentuk wawancara.

5. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:¹⁸

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian dilapangan baik dengan wawancara dan observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.
- c. Data tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁹

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

¹⁸ Zainuddin Ali.*Op.Cit.*, h. 175-176.

¹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan
- c. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

7. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif yang merupakan cara menghasilkan penelitian deskriptif yaitu segala hal yang di nyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tulisan serta mengamati perilaku subjek yang di teliti.²⁰ Selanjutnya penulis akan membuat kesimpulan dengan cara induktif yang menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Op.Cit.*, h.32

²¹ Alim Arsyd, *Metode Ilmia Persiapan Bagi Peneliti*, (Pekanbaru, UNRI Press, 2005), h.



F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN:

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN:

Bab ini memuat uraian tentang gambaran umum lokasi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki.

BAB III TINJAUAN TEORITIS:

Bab ini memuat uraian teori-teori tentang dasar hukum yang melandasi permasalahan Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Fasilitas Pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan penyediaan fasilitas terhadap penumpang pada terminal Bandar Raya Payung Sekaki ?
2. Apa faktor penghambat penyediaan fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Dan Geografis Kecamatan Payung Sekaki

Kecamatan Payung Sekaki merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 42 RW dan 197 RT. Luas wilayah Kecamatan Payung Sekaki adalah 51,36 km² dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

1. Kelurahan Labuh Baru Timur : 1,20 km²
2. Kelurahan Tampan : 4,00 km²
3. Kelurahan Air Hitam : 9,00 km²
4. Kelurahan Labuh Baru Barat : 4,20 km²
5. Kelurahan Bandar Raya : 9,00 km²
6. Kelurahan Sungai Sibam : 9,96 km²
7. Kelurahan Tirta Siak : 4,00 km²

Batas-batas wilayah Kecamatan Payung Sekaki adalah:

1. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Senapelan
2. Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Kampar
3. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Rumbai
4. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tampan dan Kecamatan Marpoyan Damai²²

²² Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang. UIN SUSKA RIAU

B. Terminal Bandar Raya payung Sekaki

Terminal Terminal Bandar Raya Payung Sekaki adalah sebuah terminal besar yang terletak di Pekanbaru, Riau yang luas kawasannya 27 hektare (HA) dan luas bangunan pendukung 7 hektare (HA). Terminal Bandar Raya Payung Sekaki ini dibangun untuk menggantikan Terminal Mayang Terurai yang terletak di jalan Nangka (Tuanku Tambusai). Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki melayani trayek Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

C. Visi dan misi

Dalam menjalankan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan penyelenggara diuntut agar menyediakan pelayanan Dan penyediaan fasilitas sebaik mungkin untuk itu di rumuskan visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

“MEMBERIKAN SEBUAH PELAYANAN TRANSPORTASI BAGI MASYARAKAT DENGAN PENGELOLAHAN TERMINAL SECARA PROPESSIONAL SEHINGGA TERCIPTANYA TERMINAL YANG BERSIH, AMAN, DAN NYAMAN”

2. Misi

- Melakukan pengelolaan terminal secara profesional
- Menegakkan disiplin bagi seluruh personil yang beratifitas di dalam terminal

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

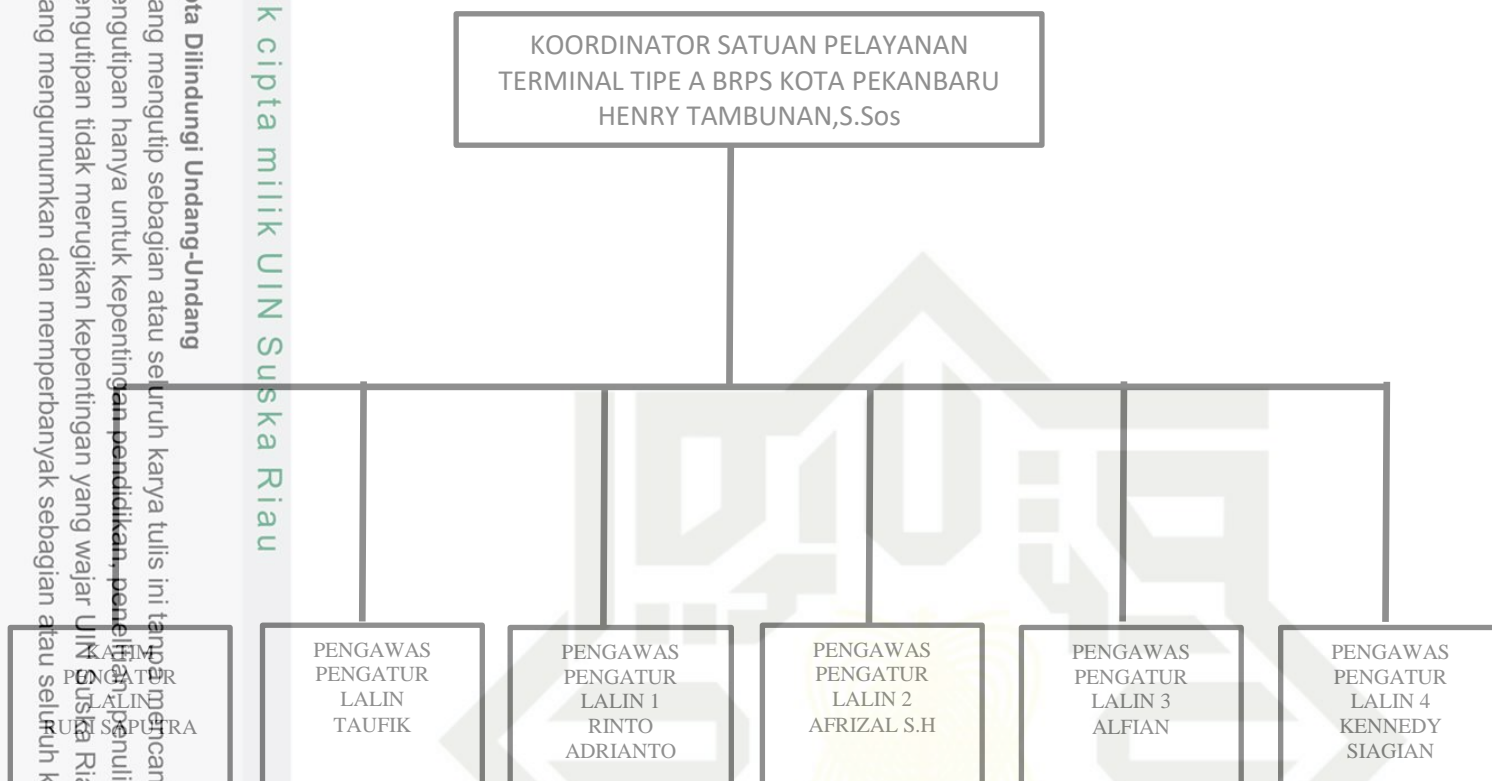
- c. Menegakkan hukum secara objektif dan profesional
- d. Melakukan konsultasi dari konsolidasi dengan seluruh pihak yang berhubungan langsung dengan pengelola Terminal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki



Sumber : Terminal Bandar Raya Payung Sekaki

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Tugas dan fungsi/ Uraian Jenis Kegiatan KORSAPEL Terminal Tipe A Payung Sekaki

- a. Merencanakan teknis oprasional terminal tipe a (rencana kerja)
- b. Melaksanakan pengumpulan pengolahan data/informasi sebagai bahan laporan
- c. Melakukan pengolahan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian kegiatan terminal tipe a
- d. Melakukan pengolahan ketatausahaan terminal tipe a kelas ii
- e. Monitoring dan evaluasi kegiatan terminal tipe a
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala balai secara berkala
- g. Melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan²³

2. Tugas dan fungsi/Uraian Jenis Kegiatan Pengatur Lalu Lintas

- a. Mengatur dan mengarahkan angkutan di zona kedatangan
- b. Mengatur dan mengarahkan angkutan di zona pendedapan
- c. Mengatur dan mengarahkan angkutan di zona keberangkatan.
- d. Mengatur dan mengendalikan lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal.
- e. Mengatur dan mengendalikan pergerakan penumpang di dalam terminal.
- f. Mengatur dan mengendalikan parkir di area terminal
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan²⁴

²³ Peraturan Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan

²⁴ *Ibid.*

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A Kebijakan (*Freies Ermessen*)

1. Definisi kebijakan (*Freies Ermessen*)

Secara bahasa *Freies Ermessen* berasal dari kata *Frei* yang artinya bebas, lepas tidak terkait, dan mardeka. *Freies* artinya orang yang bebas, tidak terikat dan mardeka. Sementara itu *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. *Freies Ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah itu kemudian digunakan secara khas dalam bidang pemerintahan sehingga *Freies Ermessen* (*Diskresionare*) diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.²⁵

Definisi lain yang hampir senada diberikan oleh Nanan Saputra, yaitu suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan pada dasarnya memperkenankan alat administrasi mengutarakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (*Doelmatigheid*) dari pada bepegang teguh pada ketentuan hukum, atau kewenangan yang sah untuk campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum. Bahsan Mutafa menyebutkan bahwa *Freies Ermessen* diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kepentingan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Ajagrafindo Persada, 2007), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antar penduduk. Kepuasan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya (*Doelmatigheid*) dari pada sesuai dengan hukum yang berlaku (*Rechtmatigheid*).²⁶

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *governmence* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governmence* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada dasarnya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan secara tidak langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.²⁷

2. Jenis-Jenis Kebijakan

a. Kebijakan Dalam Arti *Freis Ermersen*

Secara bahasa *Freies Ermessen* berasal dari kata *Frei* yang artinya bebas, lepas tidak terkait, dan merdeka. *Freies* artinya orang yang bebas, tidak terikat dan merdeka. Sementara itu *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. *Freies Ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah itu kemudian digunakan secara khas dalam bidang pemerintahan sehingga *Freies Ermessen* (*Diskresionare*) diartikan sebagai salah satu sarana yang

²⁶ *Ibid*, h. 178

²⁷ Edi Suharto, *Op.Cit.*, h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.²⁸

b. Kebijakan Dalam Arti Diskresi

Diskresi adalah pengambilann keputusan dan/tindakan yang tujuannya demi memudahkan penyelenggaraan pemerintah, kemudian mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mampu mengisi stagnasi pemerintahan untuk memberikan mamfaat dan kepentingan umum dalam kondisi-kondisi tertentu.²⁹

Jika dirunut, sebenarnya peristilahan diskresi mempunyai hubungan yang dekat dengan dengan freies emrresen dlam paham negara kesejahteraan. Keberadaan peraturan kebijaksanaan tidak dapat dipaksakan dengan kewenangan bebas dari pemerintah yang akrab disebut dengan istilah freies emersen.³⁰ Diskresi atau freies ermerssen yaitu segala aktifitas yang melibatkan proses pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan ataupun tindakan atas inisiatif sendiri, tidak terpaku ada ketentuan aturan atau undang-undang dengan berbagai pertimbangan yang matang, konstektual dan dapat dipertanggung jawabkan.³¹

²⁸ Ridwan HR, *Loc.Cit.*, h. 177.

²⁹ Harun Dkk, *Hukum Administrasi Negara Di Era Citizan Friendly*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), h.110

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* h.111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kebijakan dalam arti legal policy

Moh. Mahfud MD mengatakan politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Lebih rinci Moh. Mahfud MD membagi 3 (tiga) kelompok politik hukum, yaitu: *pertama*, arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (*legal policy*) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum-hukum yang baru sama sekali; *kedua*, latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan; dan *ketiga*, persoalan-persoalan disekitar penegakan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan. Pijakan yang menjadi landasan dari politik hukum adalah mewujudkan tujuan negara dan sistem hukum dari negara yang bersangkutan dalam konteks Indonesia, tujuan dan sistem hukum itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya Pancasila yang melahirkan kaedah-kaedah penuntun hukum.³²

- d. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*publik values*). Nilai-nilai

³² Anna Triningsih, *Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara*, (Semarang: Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016), h. 126-127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepublikan sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud bermacam-macam. Namun demikian, secara umum kebijakan publik adalah alat untuk mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan masyarakat dan melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan.³³

Kebijakan publik sangat tepat jika dikatakan sebagai apa yang harus atau tidak harus dilakukan pemerintah. Pemerintah sebagai pengambil keputusan dari masyarakat pada umumnya harus mampu memilih berbagai isu yang paling banyak menarik mayoritas masyarakat yang sangat pluralis. Sehingga yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah seperangkat politik yang dilegalisasikan melalui hukum formal oleh pemerintah untuk mencapai kehendak politik.

Menurut Candler dan Plano dalam Hesel Nogi S. Tangkilisan, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Pendapat lain menyatakan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Anderson memberikan definisi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, yang membawa implikasi :

³³ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta : Gava Media, 2012), h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi kepada tujuan.
- 2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- 4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- 5) Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.³⁴

3. Proses Perumusan Kebijakan

Salah satu tugas pemerintah adalah sebagai perumus kebijakan publik. Agar kebijakan publik dapat dirumuskan secara sistematis, diperlukan sebuah proses yang sistematis pula. Hampir semua penjelasan mengenai proses perumusan kebijakan bergerak melalui tiga tahapan, yaitu pengembangan ide, melakukan aksi dan mengevaluasi hasil.³⁵ Meski proses perumusan kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai tahapan yang beragam dalam hal ini langkah-langkahnya akan dimulai dari identifikasi isu, merumuskan agenda kebijakan,

³⁴ Abu Samah, *Hukum Kebijakan Publik*, (Pekanbaru: STAI H.M Lukman Edy Press, 2015) h. 27.

³⁵ Edi Suharto, *Op.Cit*, h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan konsultasi, menetapkan keputusan, menerapkan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan.

a. Mengidentifikasi Isu Kebijakan

Isu-isu kebijakan pada hakikatnya merupakan permasalahan sosial yang aktual, mempengaruhi banyak orang dan mendesak untuk dipecahkan. Isu tersebut biasanya muncul berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi atau organisasi non-pemerintahan. Selain aktual dan mendesak untuk dipecahkan, isu biasanya mencuat jika didukung oleh pemberitaan media massa yang beragam. Tidak semua masalah sosial bisa menjadi isu kebijakan, setidaknya ada empat persyaratan agar masalah bisa teridentifikasi sebagai isu kebijakan sosial:

- 1) Disepakati banyak pihak.
- 2) Memiliki prospek akan solusinya.
- 3) Sejalan dengan perkembangan politik.
- 4) Sejalan dengan ideologi.³⁶

b. Merumuskan Agenda Kebijakan

Identifikasi dan perdebatan mengenai isu-isu di atas melahirkan agenda kebijakan. Agenda kebijakan pada intinya merupakan sebuah masalah sosial yang paling memungkinkan direspon oleh kebijakan. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi pergeseran isu menjadi agenda kebijakan. Faktor internal, meliputi:

³⁶ *Ibid.*, h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Gaya kepemimpinan politisi.
- 2) Visi dan misi partai pendukung pemerintah.
- 3) Keberhasilan pemerintah dimasa lalu.
- 4) Perubahan struktur pemerintahan dan kabinet.
- 5) Perubahan anggaran pendapatan belanja negara.³⁷

Faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan dari isu kebijakan menjadi agenda kebijakan adalah:

- 1) Perubahan ekonomi.
 - 2) Pemberitaan media massa.
 - 3) Opini publik.
 - 4) Perubahan keputusan pengadilan.
 - 5) Hubungan internasional.
 - 6) Pembangunan teknologi.
 - 7) Perubahan demografi.³⁸
- c. Melakukan Konsultasi
- Arsitektur pemerintahan cenderung bersifat multi-ragam, melibatkan banyak lembaga dan sektor kehidupan. Karenanya, untuk menghadapi tumpang tindih kepentingan dan memperoleh dukungan yang luas dari publik setiap agenda kebijakan perlu didiskusikan dengan berbagai lembaga dan pihak. Inilah saatnya melakukan konsultasi. Melalui konsultasi, ide-ide dapat diuji dan proposal kebijakan disempurnakan.

³⁷ *Ibid.*,h. 29

³⁸ *Ibid.*,h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa alasan mengapa pemerintah mengkonsultasikan agenda kebijakan, sebagai berikut.

- 1) Nilai-nilai demokratis yang menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi dan masukan dari sebanyak mungkin orang.
 - 2) Membangun konsensus dan dukungan politik.
 - 3) Meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga yang terkait dengan agenda kebijakan dan lembaga yang mermuskan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut.
 - 4) Meningkatkan kualitas agenda kebijakan melalui pengumpulan informasi dari beragam pihak dan dengan menggunakan beragam media.
 - 5) Mempercepat respon dan perumusan strategi-strategi kebijakan yang akan ditetapkan untuk mengatasi agenda kebijakan prioritas.³⁹
- d. Menetapkan Keputusan
- Setelah isu kebijakan teridentifikasi, agenda kebijakan dirumuskan, dan konsultasi dilakukan, maka tahap berikutnya adalah menetapkan alternatif kebijakan apa yang akan diputuskan. Jika kebijakan diwujudkan dalam program pelayanan sosial, tahap penetapan keputusan kebijakan melibatkan pembuatan pertimbangan kabinet. Jika kebijakan berbentuk peraturan dan perundang-undangan, maka pembuatan keputusan melibatkan pihak eksekutif dan legislatif.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, h. 33

⁴⁰ *Ibid.*, h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Menerapkan Kebijakan (*Implementasi*)

Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan. Apabila sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan menginjak tahap implementasi. Tahap ini melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang di ambil, instrumen kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah dipersiapkan dan laporan-laporan yang akan dievaluasi.

Para pembuat kebijakan harus sudah mempersiapkan strategi implementasi sejak awal kebijakan dirumuskan. Kebijakan publik dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas para pembuat dan penasihat kebijakan harus mencakup perumusan langkah-langkah strategis dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴¹

f. Mengevaluasi Kebijakan

Perumusan kebijakan pada hakikatnya merupakan proses yang terus-menerus yang tiada henti. Karenanya, tidak mengherankan jika proses perumusan kebijakan sering disebut sebagai lingkaran kebijakan yang berputar terus-menerus. Secara formal, evaluasi merupakan tahap “akhir” dari sebuah proses pembuatan kebijakan.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, h. 36

⁴² *Ibid.*, h. 40

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipahami sebagai suatu proses, *output*, dan *outcome*. Implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai proses karena didalamnya terjadi beberapa rangkaian aktivitas yang berkelanjutan.⁴³

Implementasi juga diartikan sebagai *outputs*, yaitu melihat apakah aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan. Akhirnya implementasi juga dikonseptualisasikan sebagai *outcomes*. Konseptualisasi ini terfokus pada akibat yang ditimbulkan dari adanya implementasi kebijakan, yaitu apakah implementasi suatu kebijakan mengurangi masalah atau bahkan menambah masalah baru dalam masyarakat.

a. Model Implementasi Kebijakan

Terdapat dua pemilihan model implementasi kebijakan menurut Rian Nugroho Dwijowijoto. Pemilihan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola dari “atas ke bawah” (*top-bottom*) dan implementasi kebijakan yang berpola dari “bawah ke atas” (*bottom-top*). Pemilihan yang kedua ialah implementasi kebijakan yang berpola paksa (*command and control*) dan mekanisme pasar (*economic incentive*).⁴⁴

b. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplmentasikan kebijakan, tentu ada beberapa faktor pendukung dan bahkan menjadi penghambat dalam

⁴³ *Ibid*, h. 99

⁴⁴ Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2003), h. 158

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengimplemtasikan kebijakan publik tersebut, dalam penelitian ini penulis merujuk pada pemikiran George C. Edwards. Ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Dalam proses komunikasi kebijakan, ada tiga hal penting menurut Edward, yaitu: Transmisi, Konsistensi dan Kejelasan.

2) Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia yang memadai, informasi, wewenang dan fasilitas.

3) Sikap dan komitmen dari pelaksana program

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan, tentu mereka akan melaksanakan kebijakan yang diinginkan para pembuat keputusan awal. Namun sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaku berbeda dengan para pembuat keputusan, maka implementasi kebijakan sangat sulit. Jadi kebijakan yang akan dilaksanakan akan berjalan secara efektif apabila mendapat dukungan daripada pelaksana kebijakan.

4) Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi implementor kebijakan. Birokrasi tidak hanya berada dalam struktur pemerintahan, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi dan insitusi-insitusi. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini mencakup dua hal, yaitu *Standar Operating Prosedur* (SOP) dan fragmentasi.

c. Aktor Implementasi Kebijakan

Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Mereka bisa berasal dari pemerintah maupun masyarakat dan diidentifikasi berasal dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan dan organisasi masyarakat.⁴⁵

B. PERHUBUNGAN

1. Definisi Perhubungan

Perhubungan adalah upaya untuk memperpendek waktu untuk menempuh jarak antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Diadakannya perhubungan dimaksudkan untuk meningkatkan mobilitas atau gerak barang, manusia, dan informasi. Mobilitas adalah gerak pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Begitu pula mobilitas manusia adalah gerak perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun mobilitas informasi adalah kecepatan sampainya informasi kepada orang lain. Dengan mobilitas, berarti memantapkan pemasaran dan penyaluran barang ke seluruh wilayah Indonesia ataupun ke luar negeri. Untuk mencapai sasaran perhubungan tersebut maka digunakanlah sarana alat pengangkutan atau alat transportasi. Perhubungan tidak hanya dilakukan dalam wilayah suatu daerah, tetapi juga antar daerah, antar pulau, atau antar negara. Perhubungan yang masih dalam wilayah suatu daerah disebut perhubungan lokal. Perhubungan yang dilakukan antara suatu daerah dengan daerah lain disebut

⁴⁵ Solahuddin Kusumanegara, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, (Jakarta: Gava Media, 2010), h.100



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhubungan antar daerah atau interlokal. Perhubungan yang dilakukan antara satu pulau dengan pulau yang lain yang masih dalam satu negara disebut perhubungan antarpulau atau interinsuler. Adapun perhubungan antara suatu negara dengan negara lainnya merupakan perhubungan antarnegara atau internasional. Untuk memperlancar perhubungan, tidak dapat dipisahkan dengan jenis perhubungan.⁴⁶

2. Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan kementerian perhubungan di pimpin oleh menteri. Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan operasi, aksesabilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi,

⁴⁶ <https://Shinealudra.Wordpress.Com/2010/11/29/Alat-Transportasi/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di daerah

- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi
- e. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan
- g. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan
- h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; dan
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan.⁴⁷

3. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat. Adapun tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;

⁴⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.⁴⁸

4. Balai Pengelolah Transportasi Darat (BPTD)

BPTD adalah unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal perhubungan darat. Adapun tugas dan fungsi bptd ialah:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasaan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksanaan penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasaan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.
- c. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasaan tarif angkutan jalan.

⁴⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat, dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.⁴⁹

5. Transportasi

Transportasi merupakan kebutuhan kedua atau kebutuhan turunan dari kebutuhan ekonomi masyarakat. Peranan transportasi pada pembangunan wilayah secara menyeluruh telah membawa dampak yang luar biasa terutama sekali pada hubungan antar berbagai wilayah (akseibilitas). Transportasi mencakup beberapa hal dalam kaitannya dalam perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya

⁴⁹ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti misalnya infrastruktur jalan raya, mode transportasi, hingga pada manajemen pengelolanya yang di lakukan oleh pengambil kebijakan maupun perencanaan.⁵⁰

6. Terminal

a. Pengertian Terminal

Menurut Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, terminal adalah tempat pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.⁵¹

Berdasarkan JUKNIS LLAJ 1995, terminal transportasi merupakan:

- 1) Titik simpul dalam jaringan transportasi yang berfungsi untuk pelayanan secara umum
- 2) Tempat pengawasan, pengendalian, pengaturan dan pengoperasian lalu lintas
- 3) Prasarana angkutan merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang
- 4) Unsur tata ruang yang berperan penting bagi efisiensi kehidupan kota.

⁵⁰ Rudi Azis Dan Asrul, *Pengantar Sistem Dan Perencanaan Transportasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.1

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Jenis Terminal

Berdasarkan JUKNIS LLAJ 1995 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 33 ayat (2) Terminal dibedakan berdasarkan jenis angkutan, yaitu:

- 1) Terminal Penumpang, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar
- 2) Terminal Barang, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.⁵²

c. Fungsi Terminal

Berdasarkan JUKNIS LLAJ 1995, fungsi Terminal Angkutan Jalan dapat ditinjau dari 3 unsur:

- 1) Fungsi terminal bagi penumpang, adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda atau kendaraan lain, tempat fasilitas-fasilitas informasi dan fasilitas parkir kendaraan pribadi.
- 2) Fungsi terminal bagi pemerintah, adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalulintas dan angkutan serta menghindari dari kemacetan, sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali kendaraan umum.

⁵² Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Fungsi terminal bagi operator/pengusaha adalah pengaturan operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan.

d. Tipe Terminal

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tipe terminal penumpang berdasarkan fungsi pelayanannya dibagi menjadi:

1. Terminal Penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
2. Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.
3. Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan

Pelayanan Prima

1. Pelayanan

Pelayanan (Barata,2004) adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan . dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang.⁵³

⁵³ Admadjati, *Layanan Prima Dalam Praktek Saat Ini*, (Yogyakarta: Depublish, 2018),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Monir (2003: 16), mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan menteri perdayagunaan Aparatur Negara (1993, mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.⁵⁴

2. Pelayanan Prima

Pelayanan prima adalah kegiatan untuk memberikan nilai tambah agar dapat memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah *excellent service* yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan.⁵⁵

Menurut Daryanto dan Setyobudi (2014), pelayanan prima adalah “pelayanan yang terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan.”⁵⁶

Pelayanan prima (*excellent service*) secara harfiah berarti pelayanan yang terbaik. Menurut Rahmayanty (2010) pelayanan prima adalah :

- Pelayanan yang sangat baik dan melampaui harapan pelanggan.
- Pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas (*quality nice*).

⁵⁴ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.128

⁵⁵ Daryanto, dkk, *Konsumen Dan Pelayanan Prima*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014),

h.127

⁵⁶ *Ibit.*, h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, secara konsisten dan akurat (handal).
- d. Pelayanan yang memenuhi kebutuhan praktis (*practical needs*) dan kebutuhan emosional (*emotional needs*) pelanggan.⁵⁷

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai pelayanan prima, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima merupakan pelayanan yang mampu memberikan kelebihan melampaui harapan.

3. Tujuan dan Fungsi Pelayanan Prima.

Menurut Daryanto, tujuan pelayanan prima antara lain sebagai berikut.

- a. Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan
- b. Untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera membeli barang/jasa yang ditawarkan pada saat itu juga
- c. Untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang/jasa yang ditawarkan
- d. Untuk menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan yang tidak perlu dikemudian hari terhadap produsen
- e. Untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan
- f. Untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala kebutuhannya.
- g. Untuk mempertahankan pelanggan.⁵⁸

⁵⁷ Nina Rahmayanti, *Manajemen Pelayanan Prima*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h.17

⁵⁸ Daryanto Dkk, *OP.Cit*, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Indikator Pelayanan Prima

Atep (2003) mengembangkan budaya pelayanan prima menjadi antara lain kemampuan (*ability*), sikap (*attitude*), penampilan (*appearance*), perhatian (*attention*), tindakan (*action*), dan tanggungjawab (*accountability*) yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut.

- a. Kemampuan (*ability*)
- b. Kemampuan adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program layanan prima yang dapat meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi dan menggunakan public relation sebagai instrumen dalam membawa hubungan kedalam dan keluar organisasi/perusahaan.
- c. Sikap (*attitude*)
Sikap adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemauan nasabah.
- d. Penampilan (*appearance*)
Penampilan adalah kemampuan seseorang baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Perhatian (*attention*)

Perhatian adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritikan dari pelanggan.

f. Tindakan (*action*)

Tindakan adalah suatu perbuatan dalam berbagai kegiatan yang nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

g. Tanggung jawab (*accountability*)

- h. Tanggung jawab yaitu suatu sikap berperihakan kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan.⁵⁹

⁵⁹ Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003), h.31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya sesuai dengan hasil analisa dari pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis angkat pada penelitian ini diantaranya.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kebijakan dalam penyediaan fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki belum sepenuhnya terlaksana, masih banyak fasilitas-fasilitas yang belum tersedia berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, hal ini berdasarkan observasi penulis dan jawaban responden.
2. Faktor penghambat dari penyediaan fasilitas Pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki yaitu anggaran dari kementrian perhubungan belum mencukupi terhadap keseluruhan apa yang harus disediakan berdasarkan Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penyediaan fasilitas terhadap penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dihasilkan oleh penulis dalam penelitian tersebut maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Apabila memungkinkan pihak penyelenggara Terminal dapat bekerja sama terhadap pemerintah daerah atau pihak swasta agar pembangunan fasilitas pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki dapat secepatnya terpenuhi.
2. Bagi masyarakat khususnya penumpang pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki sekiranya dapat memberi masukan atau saran mengenai kekurangan penyelenggara dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Admadjati, 2018. *Layanan Prima Dalam Praktek Saat Ini*. Yogyakarta. Depublish.
- Agus, Erwan dan Ratih, Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta. Grava Media.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafari.
- Arsyid, Alim. 2005. *Metode Ilmia Persiapan Bagi Peneliti*. Pekanbaru. UNRI Press.
- Azis, Rudi Dan Asrul. 2018. *Pengantar Sistem Dan Perencanaan Trasnportasi*. Yogyakarta CV Budi Utama.
- Barata, Atep Adya. 2003. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta PT Elex Media Komputindo.
- Daryanto. dkk. 2014. *Konsumen Dan Pelayanan Prima*. Yogyakarta Gava Media.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi. Implementasi. Dan Evaluasi*. Jakarta PT. Elek Media Komputindo.
- Fathiudin, Didin. 2015. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi. Manajemen Dan Akutansi*. Sidoarjo. Zitama Publisher.
- Harun. Dkk. 2018. *Hukum Administrasi Negara Di Era Citizan Friendly*. Surakarta. Muhammmadiyah University Press.
- HR, Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta PT. Grafindo Persada.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media.
- ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Rahmayanti, Nina. 2010. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta Graha Ilmu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Samah, Abu dan Ali, Muhammad. 2015 *Hukum Kebijakan Publik*. Pekanbaru STAI H.M Lukman Edy Press.

Sinambela. Dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik Teori. Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono Dan Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Sore, Uddin B, Dkk. 2017. *Kebijakan Publik*. Makasar. CV. Sah Media.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif. dan Kualitatif R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sugono, Bambang. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung CV. Alfabeta.

Suratman Dan H, Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung CV. Alfabeta.

Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*, Bandung. Alfabeta

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah, Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No Pm 40 Tahun 2015
Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun
2017 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di
Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perhubungan
Darat Kementerian Perhubungan

C. Jurnal

Musdalipa Dkk. 2017. *Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*. Jurnal Administrasi Publik.

Kurniawan. Robi Cahyadi. 2016. *Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah*. Lampung. Fiat Justisia Journal Of Law.

Pandey. Siska V. 2016. *Pentingnya Master Plan Dalam Proses Pembangunan Terminal*. Angkutan Jalan. Manado.

Triningsih Anna. 2016. *Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara*. Semarang.

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

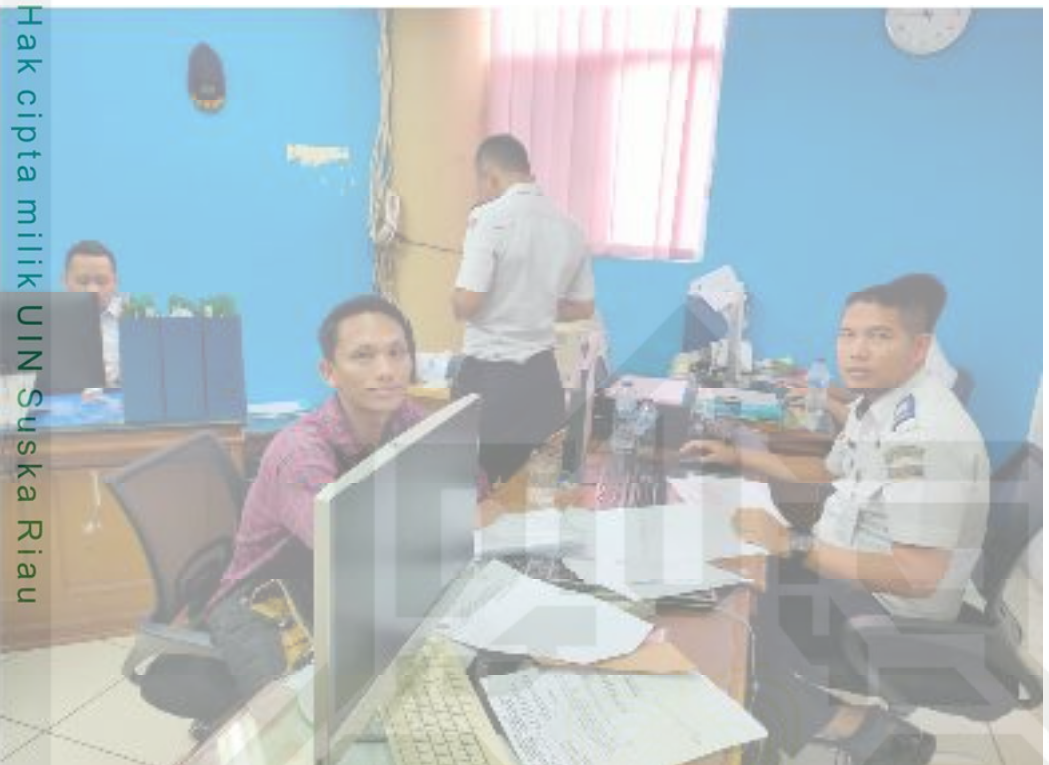


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



WAWANCARA PENULIS DENGAN PENYELENGGARA TERMINAL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan pada terminal sudah berjalan maksimal?
2. Apakah anggaran terhadap pembangunan fasilitas bandar raya payung sekaki hanya terpaku dari apbn?
3. Apakah penyelenggara telah membuat kebijakan agar fasilitas dan pelayanan pada terminal dapat berjalan maksimal?
4. Apakah penyediaan fasilitas terhadap penumpang pada terminal bandar raya payung sekaki sudah terpenuhi?
5. Apakah fasilitas yang tersedia pada saat ini sudah efektif terhadap pelayanan pada terminal bandar raya payung sekaki?
6. Apakah pihak terminal berkordinasi kepada bptd wilayah iv riau kepri mengenai penyediaan fasilitas pada terminal bandar raya payung sekaki?
7. Apa upaya penyelenggara dalam memenuhi fasilitas pada terminal bandar raya payung sekaki agar secepatnya dapat terpenuhi?
8. Apa faktor penghambat dalam penyediaan fasilitas pada terminal bandar raya payung sekaki?
9. Apakah retribusi masih dipungut setelah adanya pengalihan wewenang terminal kepada pusat?
10. Sejauh mana penyelenggara terminal dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitas terhadap penumpang?



PENGESAHAN PEMBIMBING

NUR HIDAYAT, SH., MH

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 6 Februari 2020

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. Massidik Siregar

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara MASSIDIK SIREGAR, yang berjudul **"Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Fasilitas Terhadap Penumpang Pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angutan Jalan"** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pembimbing

NUR HIDAYAT, SH.,MH
NIK.13027038

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Massidik Siregar
NIM : 11527104063
Tempat/Tanggal Lahir : Sosa III B, 20 Agustus 1996
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYEDIAAN FASILITAS TERHADAP PENUMPANG PADA TERMINAL BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 40 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN"** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Mai 2020
Yang membuat pernyataan

MASSIDIK SIREGAR
NIM. 11527104063



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كافة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/8083/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
mengatakan bahwa :

Nama : MASIDIK SIREGAR
NIM : 11527104063
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 15 AGUSTUS 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 9 Oktober 2019

Dekan,



DR/Drs. H. Hajar, M. Ag

NIP. 195807121986031005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul "PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYEDIAAN FASILITAS TERHADAP PENUMPANG PADA TERMINAL BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 04 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN KELENGKAPAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN", ditulis oleh

Nama : Masidik Siregar

NIM : 11527104063

Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 25 Juli 2019

Narasumber : Hj. Nur'aini Sahu, SH., MH.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru, 30 Juli 2019
Narasumber

Hj. Nur'aini Sahu, SH., MH.

NIP. 195907111995032001

Erni, S.Sos, MM

NIP. 19680226199103002

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax, 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 26 Desember 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Surat No. 04 F.I/PP.00.9/9021/2019

(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepala
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MASSIDIK SIREGAR
NIM : 11527104063
Jurusan : Ilmu Hukum SI
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : BPTD wilayah IV provinsi riau dan provinsi kepulauan riau dan
terminal akap payung sekaki

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan kebijakan penyediaan Fasilitas pada terminal tipe A Bandar raya payung
sekaki berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No:PM 40 tahun
2015 Tentang standar Pelayanan Penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1005

Rektor UIN Suska Riau



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/29166
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak melukikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Rekomendasi Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9021/2019 Tanggal
26 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|---|---|
| : | MASSIDIK SIREGAR |
| : | 11527104063 |
| : | ILMU HUKUM |
| : | S1 |
| : | PEKANBARU |
| : | PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYEDIAAN FASILITAS PADA TERMINAL TIPE A BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO: PM 40 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN |
| : | 1. BPTD WILAYAH IV PROVINSI RIAU DAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
| : | 2. TERMINAL TIPE A BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Desember 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Revisi :

Ditandatangani Kepala Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) IV Wilayah Riau dan Provinsi Kepulauan Riau
3. KORSAPEL Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BPTD WILAYAH IV PROV. RIAU & PROV. KEPULAUAN RIAU
SATUAN PELAYANAN TERMINAL TIPE A BRPS - PEKANBARU

JL. T. TAMBUSAI
PEKANBARU - RIAU

Telp : (0761)

Fax : (0761)

Email : brpskotapekanbaru@gmail.com

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor 275/TERM TIPE . A / XII /2019

Surat Keterangan di bawah ini Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki
Kota Pekanbaru, menerangkan bahwa :

Nama	: MASIDIQ SIREGAR
Nim	: 11527104063
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jurusan/Fakultas	: Ilmu Hukum

Surat tersebut diatas telah melakukan penelitian dan wawancara tentang "Pelaksanaan Kebijakan
Penyediaan Fasilitas Pada Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No: Pm 40 Tahun 2015 Tentang Standar
Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Sehingga Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Desember 2019

KOORDINATOR SATUAN PELAYANAN
TERMINAL TIPE A BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI
KOTA PEKANBARU



HENRY TAMBUNAN, S.Sos

Penata / III C

NIP. 19661222 199203 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MASSIDIK SIREGAR

NPM : 11527104063

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul : *Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Fasilitas Terhadap Penumpang Pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: Pm 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan*

Pembimbing : Nurhidayat SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Mei 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL.

NIK. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis Bernama “**Massidik Siregar**” penulis mengawali pendidikan pendidikan Sekolah Dasar di SD SDN 101900 di Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas selama beberapa tahun dan selesai di tahun 2009. Pada Tahun 2009 melanjutkan kembali Pendidikan SMP Negeri 3 Hutaraja Tinggi Kecamatan Kabupaten Padang Lawas, lulus tahun 2012. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMA Negeri 1 Barumu Kabupaten Padang Lawas, dan lulus pada Tahun 2015. Dan di tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2015 di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Konsetrasi Hukum Tata Negara (HTN), selanjutnya pada bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas Siak. Hingga akhirnya, pada tanggal 7 April 2020 penulis mengikuti ujian Sidang Munaqasah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan dinyatakan “LULUS” dengan predikat “Sangat Memuaskan” serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

UIN SUSKA RIAU

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.